

Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Kertosari, Jember)

Maulinda Suryani Putri¹, Diana Dwi Astuti², Mainatul Ilmi³

Institut Teknologi dan Sains Mandala Jember^{1,2,3}

Kampus : Jl. Sumatra No.118-120, Tegal Boto Lor, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember,
Jawa Timur 6812

Email : stie-mj@stie-mandala.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran, kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kertosari, Jember. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa dan masyarakat di Desa Kertosari, Jember. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode *simple rondem sampling* dengan menggunakan sampel 60 responden. Teknik analisis data dilakukan dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dan kejelasan sasaran anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sementara itu, secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi perangkat desa, kepemimpinan yang efektif, keterlibatan masyarakat, serta sistem pelaporan yang transparan berperan penting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Akuntansi Sektor Publik, Dana Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of budget target clarity, village apparatus competence, leadership style, community participation, and reporting system on the accountability of village fund management in Kertosari Village, Jember. This research uses quantitative methods with a survey approach through questionnaires. The population in this study were all village officials and the community in Kertosari Village, Jember. The data collection technique used was simple rondem sampling method using a sample of 60 respondents. The data analysis technique was carried out by multiple linear regression. The results showed that partially the variables of village apparatus competence, leadership style, community participation, and reporting system had a significant effect on the accountability of village fund management and the clarity of budget targets had no significant effect. Meanwhile, simultaneously the variables of budget target clarity, village apparatus competence, leadership style, community participation, and reporting system have a significant effect on the accountability of village fund management. This finding confirms that increasing the competence of village officials, effective leadership, community involvement, and a transparent reporting system play an important role in realizing the accountability of village fund management.

Keywords: Accountability, Public Sector Accounting, Village Funds

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari peran strategis desa sebagai unit pemerintahan terkecil yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan melalui program Dana Desa. Sejak pertama kali dikurirkan, Dana Desa diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan partisipatif, pemerataan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Namun dalam praktiknya, pengelolaan Dana Desa sering kali menemui tantangan serius, terutama dalam hal akuntabilitas dan transparansi. Kasus penyalahgunaan dana, ketidaksesuaian pelaporan, hingga lemahnya pengawasan menjadi permasalahan umum yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah. Laporan dari berbagai lembaga pengawas keuangan mengindikasikan bahwa desa merupakan salah satu titik rawan terjadinya penyimpangan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desa telah diberi kewenangan dan dana yang cukup besar, kemampuan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana tersebut masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW), sektor desa tercatat sebagai penyumbang kasus korupsi terbanyak sejak 2015 hingga 2023, dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan anggaran belum sejalan dengan penguatan sistem pengawasan dan pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik di tingkat desa.

Desa Kertosari yang berada di Kabupaten Jember merupakan salah satu desa yang menarik untuk dikaji dalam konteks ini. Desa ini menerima alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahun, yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik desa. Meskipun demikian, Desa Kertosari juga menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan Dana Desa yang akuntabel.

Akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa menjadi aspek yang sangat penting karena menyangkut kepercayaan publik dan efektivitas penggunaan dana publik. Akuntabilitas tidak hanya diukur dari kepatuhan administratif, tetapi juga mencerminkan sejauh mana penggunaan dana tersebut memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Untuk mewujudkan pengelolaan dana yang akuntabel, diperlukan berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Beberapa faktor yang diyakini mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Dana Desa antara lain: kejelasan sasaran anggaran, kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan kepala desa, partisipasi aktif masyarakat, serta sistem pelaporan yang baik.

Beberapa variabel diyakini berperan penting dalam mendorong terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Pertama, kejelasan sasaran anggaran menjadi landasan utama dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran. Tanpa tujuan yang terdefinisi dengan baik, alokasi anggaran rentan mengalami deviasi dan tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedua, kompetensi perangkat desa merupakan aspek krusial karena pengelolaan Dana Desa memerlukan pemahaman terhadap regulasi keuangan publik, akuntansi dasar, serta manajemen proyek desa. Ketiga, gaya kepemimpinan kepala desa juga memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas organisasi desa, terutama dalam membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Keempat, partisipasi masyarakat menjadi indikator dari keberhasilan demokrasi desa, di mana keterlibatan warga dalam proses musyawarah, pengawasan, dan evaluasi penggunaan anggaran dapat mendorong akuntabilitas dari bawah ke atas. Terakhir, sistem pelaporan yang efektif akan menjadi sarana utama untuk menyampaikan informasi pengelolaan keuangan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi

pemerintah desa, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki sistem pengelolaan Dana Desa agar lebih akuntabel, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas merujuk pada sejauh mana pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada masyarakat dan instansi terkait. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak yang diberi mandat untuk memberikan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik dan hasil yang dicapai kepada pihak pemberi mandat.

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa menyangkut aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dan kegiatan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan dapat diaudit secara terbuka. Penyusunan laporan keuangan menjadi sarana penting dalam mewujudkan bentuk pertanggungjawaban tersebut, di mana laporan keuangan harus disusun secara jujur, objektif, dan tepat waktu.

2. Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan penggunaan anggaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Dalam penelitian ini, kejelasan sasaran anggaran menjadi variabel penting karena anggaran yang jelas akan memudahkan pengukuran kinerja dan pertanggungjawaban pemerintah desa. Menurut Locke & Latham (1984), sasaran yang jelas membantu individu dan organisasi dalam meningkatkan motivasi, fokus kerja, serta pencapaian hasil.

Indikator kejelasan sasaran anggaran mencakup tujuan, kinerja, standar, jangka waktu,

sasaran prioritas, tingkat kesulitan, dan koordinasi. Anggaran yang tidak memiliki sasaran yang jelas rentan terhadap penyimpangan karena sulit untuk dievaluasi dan dipertanggungjawabkan. Sayangnya, meskipun perangkat desa telah menyusun anggaran secara rinci, kurangnya pemahaman terhadap substansi sasaran anggaran menyebabkan dampak kejelasan tersebut terhadap akuntabilitas tidak signifikan dalam hasil penelitian ini.

3. Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi perangkat desa mencerminkan kemampuan, pengetahuan, dan sikap dalam mengelola anggaran desa secara profesional. Kompetensi yang baik memungkinkan perangkat desa untuk menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertib, efisien, dan sesuai regulasi. Laksmi & Sujana (2019) menjelaskan bahwa kompetensi SDM meliputi keahlian dalam menangani tanggung jawab pekerjaan secara efektif.

Kompetensi diukur melalui indikator pelatihan, prioritas kerja, sikap, koordinasi, dan kerja sama. Kinerja perangkat desa yang kompeten tidak hanya menghasilkan laporan yang akurat, tetapi juga menghindari kesalahan administratif serta meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi perangkat desa berbanding lurus dengan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

4. Gaya Kepemimpinan

Gaya kepemimpinan adalah pendekatan seorang pemimpin dalam mengarahkan, membimbing, dan mempengaruhi anggotanya. Dalam pemerintahan desa, gaya kepemimpinan kepala desa sangat menentukan keberhasilan implementasi program dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Menurut Nugroho & Suprpto (2021), gaya kepemimpinan mencakup kemampuan mengatur bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif.

Thoha (2010) mengidentifikasi empat dimensi utama gaya kepemimpinan, yaitu inovator, komunikator, motivator, dan kontroler. Dalam konteks pengelolaan Dana Desa, kepala desa yang memiliki gaya kepemimpinan terbuka, partisipatif, dan komunikatif lebih mampu

menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel dan kolaboratif. Penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang positif berdampak signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas.

5. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mengacu pada keterlibatan aktif warga desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan desa. Partisipasi ini penting sebagai bentuk kontrol sosial yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2018), keterlibatan masyarakat mencerminkan demokrasi partisipatif yang sehat dalam pemerintahan.

Partisipasi diukur melalui keikutsertaan dalam musyawarah desa, pengawasan proyek, serta pemberian masukan terhadap penggunaan Dana Desa. Partisipasi aktif meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap program desa dan mendorong pengelolaan dana yang lebih bertanggung jawab. Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang beragam ada yang menemukan pengaruh signifikan, ada pula yang tidak, tergantung konteks dan pelaksanaan di masing-masing desa.

6. Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan instrumen utama dalam penyampaian informasi terkait pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan Dana Desa, sistem pelaporan yang baik harus akurat, jujur, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh masyarakat. Menurut Sawitri & Gayatri (2021), laporan yang baik harus relevan, konsisten, tepat waktu, dan dapat dipercaya.

Pelaporan yang transparan akan mendorong terciptanya kepercayaan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Selain itu, sistem pelaporan yang akuntabel juga mendukung proses audit kinerja yang menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi pengelolaan Dana Desa. Dalam penelitian ini, sistem pelaporan terbukti berpengaruh signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas di Desa Kertosari.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistic (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat uji pengitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2019).

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi objek kajian dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini, populasi mencakup seluruh perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT, dan Ketua RW di Desa Kertosari, Kabupaten Jember, dengan jumlah 101 orang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili karakteristik seluruh populasi, dan dari sampel inilah data dikumpulkan untuk dianalisis. Penelitian ini menggunakan teknik *Simple Random Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel secara acak, di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Roscoe dalam Sugiyono (2019), yang menyatakan bahwa untuk analisis multivariat seperti regresi linier, jumlah sampel minimal adalah 10 kali jumlah variabel. Dengan total 6 variabel yang diteliti, maka jumlah sampel yang digunakan adalah 60 responden.

C. Definisi Operasional

kejelasan sasaran anggaran (X1) didefinisikan sebagai sejauh mana tujuan penggunaan anggaran disusun secara spesifik, terukur, dan terarah, sehingga memudahkan proses evaluasi dan pelaksanaan. Indikator kejelasan sasaran anggaran meliputi: (1) tujuan, yaitu kejelasan hasil yang ingin dicapai dari anggaran; (2) kinerja, yakni ukuran ketercapaian terhadap hasil yang direncanakan; (3) standar, berupa pedoman atau tolok ukur yang digunakan dalam pelaksanaan; (4) jangka waktu, yang menjelaskan durasi pelaksanaan kegiatan; (5)

sasaran prioritas, menunjukkan kegiatan mana yang paling mendesak untuk didanai; (6) tingkat kesulitan, terkait kompleksitas kegiatan yang akan dilaksanakan; serta (7) koordinasi, yakni sejauh mana perencanaan dilakukan secara terpadu antar unit pelaksana (Locke dan Lathan, 1984).

Kompetensi perangkat desa (X2), yaitu kemampuan teknis, manajerial, dan sikap profesional yang dimiliki oleh perangkat desa dalam melaksanakan tugasnya. Indikator yang digunakan mencakup: (1) pelatihan yang diikuti, menggambarkan sejauh mana perangkat memperoleh pembinaan atau peningkatan kapasitas; (2) prioritas kerja, mencerminkan kemampuan dalam menentukan skala prioritas tugas; (3) sikap, mengacu pada komitmen dan etos kerja; (4) koordinasi, menunjukkan kemampuan bekerja lintas bagian secara sinergis; dan (5) kerja sama, yaitu kemampuan menjalin hubungan kerja yang harmonis dengan pihak lain (Febrianti & Amalia, 2024).

Gaya kepemimpinan (X3), merujuk pada cara kepala desa dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengelola perangkat serta masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Indikatornya terdiri atas: (1) kemampuan inovasi, yakni sejauh mana kepala desa mampu menciptakan terobosan; (2) pengambilan keputusan, mengukur kemampuan dalam menentukan pilihan strategis; (3) motivasi, yaitu daya dorong yang diberikan kepada perangkat desa; (4) komunikasi, menunjukkan keterbukaan dalam menyampaikan informasi dan menerima masukan; (5) pengendalian bawahan, menggambarkan kontrol terhadap pelaksanaan tugas; (6) pengendalian emosi, berkaitan dengan stabilitas dalam menghadapi tekanan; serta (7) kepribadian dan watak, yang mencerminkan integritas dan keteladanan (Thoha, 2010).

Partisipasi masyarakat (X4), yaitu keterlibatan aktif warga desa dalam setiap tahap siklus pengelolaan Dana Desa. Indikatornya meliputi: (1) keterlibatan dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui musyawarah desa; (2) keterlibatan dalam perencanaan anggaran, termasuk memberi usulan program prioritas; (3) keterlibatan dalam pengawasan dan pelaporan,

seperti ikut memantau pelaksanaan kegiatan; serta (4) penilaian terhadap pelaksanaan anggaran, yaitu tanggapan masyarakat terhadap kinerja pengelolaan dana (Ronal, 2023).

Sistem pelaporan (X5), yang didefinisikan sebagai prosedur penyampaian informasi keuangan dan kegiatan secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Indikatornya mencakup: (1) kelengkapan laporan keuangan, yaitu sejauh mana seluruh transaksi terdokumentasi; (2) fungsi laporan sebagai alat koreksi, yakni kemampuan laporan untuk mengidentifikasi kekurangan; (3) laporan untuk kebutuhan umum, yang berarti laporan disusun untuk dapat diakses publik; (4) uji kelayakan laporan, yaitu validitas dan reliabilitas informasi dalam laporan; serta (5) kemudahan pemahaman dan perbandingan, yang menunjukkan sejauh mana laporan disusun dalam format yang mudah dibaca dan dianalisis (Ronal, 2023).

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan Dana Desa (Y). Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat dan instansi yang berwenang. Akuntabilitas diukur melalui lima indikator, yaitu: (1) akuntabilitas kejujuran, yang mencerminkan integritas pengelola dana; (2) akuntabilitas hukum, yaitu kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku; (3) akuntabilitas proses, mengacu pada keteraturan pelaksanaan kegiatan; (4) akuntabilitas program, yaitu ketercapaian tujuan kegiatan; dan (5) akuntabilitas kebijakan, yang menilai kesesuaian dengan arah kebijakan desa (Ellwood, 1993).

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati langsung kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta partisipasi masyarakat tanpa terlibat secara aktif. Teknik ini

membantu peneliti memahami kondisi faktual di lapangan dan menjadi data pendukung untuk memvalidasi hasil kuesioner,

2. Kuesioner

Kuesioner adalah pengumpulan data yang disusun dalam bentuk pernyataan tertutup berdasarkan indikator masing-masing variabel, kemudian disebarkan langsung kepada responden yang terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat. Setiap pertanyaan dalam kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, yaitu “Sangat Setuju”, Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan “Sangat Tidak Setuju”, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan.

3. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku literatur serta jurnal ekonomi dan akuntansi, guna mendukung landasan teori dalam penelitian. Melalui studi pustaka, peneliti memperoleh pemahaman teoritis dan temuan empiris yang mendukung penyusunan indikator, perumusan hipotesis, dan pengembangan instrumen penelitian. Selain itu, studi pustaka membantu mengidentifikasi celah penelitian serta membandingkan hasil penelitian terdahulu sebagai pijakan analisis dalam penelitian ini.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan beberapa tahapan analisis data. Pertama, dilakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan pertanyaan dalam kuesioner akurat dan konsisten. Selanjutnya, dilakukan uji asumsi klasik seperti uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan data layak dianalisis. Analisis utama menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh lima variabel independen kejelasan sasaran anggaran, kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel tersebut secara

keseluruhan, sementara uji t dan uji F digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial dan simultan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuisisioner. Responden dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa dan Perwakilan Masyarakat Desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, BPD, dan Perwakilan Masyarakat yaitu RT/RW dari setiap Dusun.

B. Responden

Ditinjau dari jenis kelamin, mayoritas responden dalam penelitian ini adalah laki-laki, yaitu sebanyak 54 orang (90%), sedangkan responden perempuan berjumlah 6 orang (10%). Ini mencerminkan bahwa dominasi peran laki-laki dalam struktur kepemimpinan dan kegiatan pemerintahan desa masih sangat kuat di Desa Kertosari..

Dari segi usia, responden yang paling banyak berada pada rentang umur 41–50 tahun sebanyak 26 orang (43%), diikuti oleh kelompok usia 31–40 tahun dan 51–60 tahun masing-masing sebanyak 15 orang (25%), serta usia 21–30 tahun sebanyak 4 orang (7%). Ini menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa didominasi oleh kelompok usia produktif yang matang secara pengalaman.

Berdasarkan jabatan, sebagian besar responden merupakan Ketua RT sebanyak 28 orang (47%), disusul oleh perangkat desa dan Ketua RW masing-masing sebanyak 12 orang (20%), serta anggota BPD sebanyak 8 orang (13%). Hal ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di tingkat RT/RW turut berperan aktif dalam pengelolaan dan pengawasan Dana Desa.

Ditinjau dari tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA sebanyak 30 orang (50%), diikuti oleh SMP sebanyak 19 orang (32%), S1 sebanyak 8 orang (13%), dan SD sebanyak 3 orang (5%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan menengah, yang secara umum

dianggap cukup dalam memahami mekanisme dasar pengelolaan keuangan desa.

C. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana item pernyataan dalam kuesioner mampu mengukur variabel yang dimaksud secara tepat. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai r hitung $> r$ tabel. Dalam penelitian ini, jumlah responden sebanyak 60 orang menghasilkan r tabel sebesar 0,2609 pada taraf signifikansi 5%.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. Item	r hitung	R tabel	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	X _{1.1}	0,679	0,2609	Valid
	X _{1.2}	0,637	0,2609	Valid
	X _{1.3}	0,589	0,2609	Valid
	X _{1.4}	0,651	0,2609	Valid
	X _{1.5}	0,854	0,2609	Valid
	X _{1.6}	0,421	0,2609	Valid
	X _{1.7}	0,651	0,2609	Valid
Kompetensi Perangkat Desa	X _{2.1}	0,807	0,2609	Valid
	X _{2.2}	0,769	0,2609	Valid
	X _{2.3}	0,653	0,2609	Valid
	X _{2.4}	0,681	0,2609	Valid
	X _{2.5}	0,64	0,2609	Valid
Gaya Kepemimpinan	X _{3.1}	0,758	0,2609	Valid
	X _{3.2}	0,705	0,2609	Valid
	X _{3.3}	0,684	0,2609	Valid
	X _{3.4}	0,671	0,2609	Valid
	X _{3.5}	0,899	0,2609	Valid
	X _{3.6}	0,395	0,2609	Valid
	X _{3.7}	0,766	0,2609	Valid
Partisipasi Masyarakat	X _{4.1}	0,761	0,2609	Valid
	X _{4.2}	0,867	0,2609	Valid
	X _{4.3}	0,794	0,2609	Valid
	X _{4.4}	0,677	0,2609	Valid
Sistem Pelaporan	X _{5.1}	0,776	0,2609	Valid
	X _{5.2}	0,749	0,2609	Valid
	X _{5.3}	0,603	0,2609	Valid
	X _{5.4}	0,648	0,2609	Valid
	X _{5.5}	0,599	0,2609	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,795	0,2609	Valid
	Y2	0,798	0,2609	Valid
	Y3	0,308	0,2609	Valid
	Y4	0,666	0,2609	Valid
	Y5	0,759	0,2609	Valid

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh item pernyataan pada variabel kejelasan sasaran anggaran, kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, sistem pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa memiliki nilai r hitung $> 0,2609$. Dengan demikian, seluruh item instrumen dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak

digunakan untuk pengumpulan data.

D. Pembahasan

Hasil penelitian melalui analisis regresi dapat dilihat dari persamaan hasil regresi berikut:

$$Y = -20,204 + 0,167X_1 + 0,563X_2 + 0,321X_3 + 0,523X_4 + 0,286X_5$$

- nilai konstanta sebesar -20,204 mengindikasikan bahwa ketika seluruh variabel independen bernilai nol, maka akuntabilitas pengelolaan Dana Desa diprediksi sangat rendah.
 - Variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) memiliki koefisien positif sebesar 0,167, artinya setiap kenaikan satu satuan pada variabel ini cenderung meningkatkan akuntabilitas Dana Desa, meskipun pengaruhnya tidak signifikan.
 - Variabel kompetensi perangkat desa (X_2) memiliki koefisien positif sebesar 0,563, yang berarti setiap peningkatan satu satuan kompetensi akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebesar 0,563, dengan asumsi variabel lain konstan.
 - Variabel gaya kepemimpinan (X_3) memiliki koefisien positif sebesar 0,321, yang berarti setiap kenaikan satu satuan pada gaya kepemimpinan, maka akuntabilitas pengelolaan Dana Desa akan meningkat, dengan asumsi variabel lain konstan.
 - Variabel partisipasi masyarakat (X_4) memiliki koefisien positif 0,523, artinya setiap peningkatan satu satuan partisipasi masyarakat akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sebesar 0,523, dengan asumsi variabel lain konstan.
 - Variabel sistem pelaporan (X_5) memiliki koefisien positif 0,286, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada sistem pelaporan meningkatkan akuntabilitas Dana Desa sebesar 0,286, dengan asumsi variabel lain konstan.
- Dari hasil perhitungan determinasi,

diketahui nilai Adjusted R^2 sebesar 0,585 menunjukkan bahwa 58,5% variasi dalam akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dapat dijelaskan oleh lima variabel independen dalam model ini, yaitu kejelasan sasaran anggaran, kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan. Artinya, model regresi ini cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas, sedangkan sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh variabel lain diluar satu variabel bebas yang diteliti.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui uji t dan uji F. Hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial, kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa, karena memiliki nilai t hitung $> t$ tabel (2,004) dan signifikansi $< 0,05$. Sementara itu, kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan secara parsial karena nilai t hitung $< t$ tabel dan signifikansi $> 0,05$. Selanjutnya, hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan kelima variabel independen berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas, dengan nilai F hitung sebesar 17,653 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, sebagian besar hipotesis dalam penelitian ini terbukti dan diterima.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sasaran anggaran telah disusun, hal tersebut belum cukup untuk meningkatkan akuntabilitas tanpa didukung oleh pelaksanaan yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran, meski penting dalam tahap perencanaan, tidak serta-merta menjamin pengelolaan yang akuntabel apabila tidak dibarengi dengan implementasi dan pengawasan yang baik. Sebaliknya, kompetensi perangkat desa terbukti penting dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Perangkat desa yang memiliki pemahaman regulasi, kemampuan administratif, dan keterampilan teknis dapat menjalankan pengelolaan dana desa secara efisien dan sesuai ketentuan. Gaya kepemimpinan yang partisipatif dan terbuka juga berperan dalam mendorong koordinasi internal yang efektif serta membangun kepercayaan antara pemimpin dan masyarakat desa. Selanjutnya, partisipasi masyarakat

memberikan kontribusi besar terhadap transparansi dan kontrol sosial. Keterlibatan warga dalam musyawarah desa, pengawasan kegiatan, serta evaluasi anggaran menciptakan iklim akuntabilitas yang berbasis pada kepentingan publik. Sistem pelaporan yang tertib, transparan, dan mudah diakses publik turut menjadi penunjang utama dalam memastikan proses pelaporan yang akuntabel, karena memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk memantau penggunaan Dana Desa secara obyektif.

Dengan demikian, meskipun kejelasan sasaran anggaran tidak menunjukkan pengaruh signifikan, keempat variabel lainnya yaitu kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Temuan ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia, kepemimpinan, dan sistem pelaporan lebih dominan dalam membentuk tata kelola yang akuntabel di tingkat desa

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa yang akuntabel di Desa Kertosari sangat dipengaruhi oleh kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan yang terbuka, partisipasi masyarakat, dan sistem pelaporan yang baik. Sementara itu, kejelasan sasaran anggaran ternyata tidak berpengaruh secara langsung terhadap akuntabilitas. Artinya, meskipun tujuan anggaran sudah ditentukan, hal tersebut belum cukup jika tidak didukung oleh pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, agar pengelolaan Dana Desa lebih transparan dan bertanggung jawab, pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan perangkat desa melalui pelatihan, melibatkan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan, serta memperbaiki sistem pelaporan agar lebih terbuka dan mudah diakses.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu desa, sehingga hasilnya belum tentu mewakili kondisi di desa lain. Selain itu, data yang diperoleh hanya berdasarkan pendapat responden melalui kuesioner, yang mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi sebenarnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan di beberapa desa sekaligus dengan pendekatan yang lebih beragam, serta menggali faktor lain yang mungkin memengaruhi, seperti

peran pengawasan dari pihak luar atau budaya kerja di lingkungan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Febrianti, R., & Amalia, D. (2024). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa , Kepemimpinan Kepala Desa , Partisipasi Masyarakat , dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 2, 256–263
- Kementrian Keuangan RI (2024). Check and Balance Pengelolaan Keuangan Desa Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4308-check-and-balance-pengelolaan-keunagan-desa-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat.html>
- Laksmi, P. S. P., & Sujana, I. K. (2019). “Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa”. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 2155–2182
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI
- Nugroho, R & Suprpto, F. (2021). *Kepemimpinan Kepala Desa. Bagian 3 : Gaya Kepemimpinan Masyarakat*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Pahlawan
- Peraturan BPK, 2014. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/u-u-no-6-tahun-2014>
- Ronal, M. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 1(1), 217–241. <https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i1.191>
- Sawitri, P. I., & Gayatri, G. (2021). Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 476.
<https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02>.
p17

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Thoha Miftah., (2010), *Pembinaan Organisasi : proses dianosa dan intervensi*, Manajemen Kepemimpinan. Yogyakarta : Gava Media.